

BPBD Kalsel Kerahkan 4 Helikopter Padamkan Kebakaran Hutan dan Lahan



<https://www.inews.id/multimedia/photo/bpbd-kalsel-kerahan-4-helikopter-padamkan-kebakaran-hutan-dan-lahan>

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Selatan mengoperasikan empat helikopter "*water bombing*" yang dikerahkan dalam upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah di provinsi itu pada Senin. Lahan yang terbakar tidak bisa dijangkau Satgas Darat, maka kami kerahkan helikopter untuk melakukan pemadaman. Dikatakannya, ada empat titik kebakaran lahan yang tidak bisa dijangkau Satgas Darat yaitu dua lokasi di Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, satu di Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar dan satu di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Saat ini upaya pemadaman dan pembasahan terus dilakukan. Teman-teman di darat juga menuju lokasi yang masih bisa dijangkau kendaraan. Diungkapkan Sahrudin, pihaknya menyiapkan empat helikopter "*water bombing*" dan dua helikopter patroli yang tergabung dalam Satgas Udara penanggulangan karhutla tahun ini.

Helikopter dioperasikan jika titik api tak bisa dijangkau kendaraan oleh Satgas Darat yang merupakan tim gabungan BPBD Kalsel, Manggala Agni Dinas Kehutanan Kalsel serta Damkar. Kebakaran lahan yang mulai terjadi dalam satu pekan terakhir, diakui dia sejalan dengan prediksi

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bahwa Kalsel saat ini mulai memasuki arah ke puncak kemarau sehingga lahan yang kering rawan terbakar. Hari ini terpantau ada 32 hotspot. Biasanya jika tak ada hujan, sekitar pukul 11.00 WITA ke atas ada muncul titik api dimana lahan mulai kering dan mudah terbakar. Meski begitu, dipastikan Sahrudin kebakaran yang terjadi pasti akibat ulah manusia. Bukan lantaran terbakar dengan sendirinya akibat faktor alam.

Kita tidak tahu ada kepentingan apa orang membakar. Bisa juga orang tidak sengaja membuang puntung rokok yang masih menyala ke lahan yang kering hingga tertiuip angin dan terbakar. Terkait terbakarnya lahan di Desa Pandahan, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut yang terus terjadi setiap tahun di musim kemarau, menurut Sahrudin cukup sulit dalam upaya pencegahannya mengingat lahan tidur yang ditumbuhi rumput ilalang. Kalau lahan dimanfaatkan untuk perkebunan atau pertanian mungkin bisa terjaga. Sekarang ini yang punya lahan juga tidak memelihara sehingga orang bebas misalnya keluar masuk lahan tidak bisa dikontrol.

Sumber Berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com>, BPBD kerahkan helikopter "water bombing" padamkan karhutla di Kalsel.
2. <https://www.inews.id>, BPBD Kalsel Kerahkan 4 Helikopter Padamkan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Catatan:

Definisi Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan dibedakan dengan kebakaran lahan. Kebakaran hutan yaitu kebakaran yang terjadi di dalam kawasan hutan, sedangkan kebakaran lahan adalah kebakaran yang terjadi di luar kawasan hutan dan keduanya bisa terjadi baik disengaja maupun tanpa sengaja.

Tugas dan Fungsi

1. KLHK:

Mengingat KLHK adalah gabungan kehutanan dan lingkungan tugas baru ditambah untuk menangani kebakaran di lahan selain kawasan hutan, memberikan sanksi kepada pemegang izin usaha bila tidak memiliki SDM, sarpras dan tidak melaksanakan pengendalian kebakaran,

koordinator pemulihan lingkungan hidup akibat Karhutla, meningkatkan koordinasi dan memberikan bantuan teknis untuk kerja sama regional dan internasional yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup akibat Karhutla;

2. Menristekdikti:

penambahan tugas kementerian di bidang pendidikan tinggi sehingga tugas terkait Karhutla adalah mengupayakan langkah agar proses kegiatan pendidikan tidak terganggu dengan penyediaan bantuan dana bagi masyarakat yang terkena dampak Karhutla, dan mendayagunakan para dosen dan mahasiswa fakultas kedokteran berpartisipasi membantu penanganan masalah kesehatan di daerah terkena dampak Karhutla;

3. Gubernur:

mengalokasikan biaya pelaksanaan pengendalian Karhutla, melaporkan pelaksanaan pengendalian Karhutla ke Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan- Penambahan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Sosial, Menteri Komunikasi dan Informasi, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala BMKG Perubahan secara mendasar terkait penambahan jumlah institusi yang dilibatkan. Institusi-institusi yang baru dimasukkan ini terkait peran dan fungsinya dalam rangka menata aspek sosial terkait dengan pendidikan dan kesehatan. Selain itu terkait dengan konflik lahan maupun pembangunan infrastruktur. Akan tetapi yang terkait dengan pembangunan desa belum termasuk dalam institusi pemerintah yang terlibat dalam pengendalian Karhutla. Secara mendasar bahwa ke depan untuk pengendalian Karhutla yang berkelanjutan semetinya melibatkan pemerintahan desa.